

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKREDITASI DAN MUTU PENDIDIKAN

A. AKREDITASI

1. Pengertian Akreditasi

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, bahwa perlu adanya keterlaksanaan pengembangan sistem akreditasi.

Menurut pengertian yang di kenal oleh umum, akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut.²⁴ Akan tetapi kebijakan tersebut sekarang ini mulai dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah secara keseluruhan baik negeri maupun swasta.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “ Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang di berikan oleh badan yang berwenang setelah di nilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu”.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah tidak lagi membedakan antara lembaga negeri dengan swasta, serta mendayagunakan keterlibatan masyarakat dengan menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akreditasi sekolah diselenggarakan atas

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 256

dasar pertimbangan upaya meningkatkan kualitas lembaga sekolah adalah upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi pengguna pendidikan terlebih guna meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bermasyarakat.

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.²⁵

Penentuan peringkat akreditasi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terakreditasi dengan peringkat A (Amat Baik) diberikan kepada sekolah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 85,01-100.
- b. Terakreditasi dengan peringkat B (Baik) diberikan kepada sekolah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 70,01-85,00.
- c. Terakreditasi dengan peringkat C (Cukup) diberikan kepada sekolah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 55,01-70,00.
- d. Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari 55 dinyatakan tidak terakreditasi.²⁶

²⁵ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS, ...*, h. 118

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah, ...*, h. 6

Pemberian status dan peringkat akreditasi tersebut diharapkan menjadi pemacu sekolah untuk terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan secara sistematis dan terprogram, yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu sekolah yang lebih baik.

Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya, sekolah diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh badan akreditasi sekolah (BAS) maka peringkat akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.²⁷

2. Fungsi dan Tujuan Akreditasi

Akreditasi sekolah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Perlindungan masyarakat (*Quality assurance*)

Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan sekolah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggungjawab.

b. Pengendalian mutu (*Quality control*)

Maksudnya agar sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.

c. Pengembangan mutu (*Quality improvement*)

Maksudnya agar sekolah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangannya.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, ..., h. 22-23

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, ..., h. 6

Dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 087/U/2002 tentang akreditasi sekolah pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan.²⁹

Tujuan umum akreditasi sekolah ialah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja sekolah guna menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Di dalam buku pedoman akreditasi sekolah swasta tujuan akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
- d. Mendorong tersedianya sarana prasarana pendidikan yang baik.

²⁹ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS, ...*, h. 118

- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- g. Memberi informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan sekolah.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain.³⁰

3. Badan Akreditasi Sekolah

Badan akreditasi sekolah adalah suatu lembaga yang dibentuk Dinas Pendidikan yang berwenang melaksanakan akreditasi. Badan akreditasi sekolah merupakan badan nonstruktural yang bersifat independen.

Badan akreditasi sekolah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan tentang kebijakan akreditasi. Badan akreditasi sekolah secara khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan penetapan perangkat akreditasi sekolah
- b. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perangkat akreditasi sekolah
- c. Pelaksanaan akreditasi di sekolah-sekolah
- d. Evaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah
- e. Pelaporan hasil akreditasi sekolah secara menyeluruh³¹

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan, ...*, h. 260-261

Susunan organisasi badan akreditasi sekolah terdiri atas: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Anggota badan akreditasi sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari 11 anggota.

B. MUTU PENDIDIKAN

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mengingat pentingnya fungsi pendidikan, adalah keharusan lembaga yang harus memberi layanan publik itu secara terus-menerus meningkatkan mutu kinerjanya. Pengertian kualitas (*quality*) dan kualitas pendidikan (*quality of education*) dalam makna kualitatif dan kuantitatif barang kali mudah dilaksanakan, akan tetapi sukar dinyatakan di dalam realitas. Mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Mutu pendidikan di sekolah diartikan sebagian kemampuan sekolah dalam pengelolaan operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.³²

Terdapat banyak definisi tentang kualitas. Ada yang menyebutkan bahwa kualitas atau mutu adalah suatu nilai atau suatu keadaan. Namun, pada umumnya kualitas memiliki elemen-elemen sebagai berikut: *pertama*, meliputi memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, *kedua*, mencakup

³¹ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS, ...*, h. 120

³² Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Cet. I. h. 78-79

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, *ketiga*, merupakan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.³³

Mutu pendidikan secara sederhana yaitu target khusus dari tujuan-tujuan pendidikan.³⁴ Pada konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yaitu input yang meliputi bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.³⁵

Ada pendapat mengenai kriteria mutu pendidikan, mutu/ keberhasilan pendidikan itu dilihat dari tiga sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu: (1) standar hasil dan pelayanan, dan (2) standar kustomer. Indikator yang termasuk ke standar hasil dan pelayanan adalah *conformance to specification, fitness for purpose or use, zero defects, dan right first time, every tim*. Terkandung makna di sini bahwa standar hasil pendidikan mencakup spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh anak

³³ Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 68

³⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.184

³⁵ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 210

didik, hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan di masyarakat atau di dunia kerja; tingkat kesalahan yang sangat kecil; bekerja benar dari awal, dan benar untuk pekerjaan berikutnya. Indikator yang termasuk ke dalam standar kustomer adalah *consumer satisfaction*, *exceeding customer expectation*, dan *delighting the customer*. Dengan demikian, standar kustomer mencakup terpenuhinya kepuasan, harapan, dan pencerahan hidup bagi kustomer itu.³⁶

Pengelolaan mutu dilakukan melalui penggunaan tiga proses manajemen, yaitu:

a. Perencanaan Mutu

Perencanaan mutu pendidikan adalah aktivitas pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perencanaan ini melibatkan langkah-langkah universal, isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menentukan siapakah pelanggannya
2. Menentukan kebutuhan pelanggan.
3. Mengembangkan keistimewaan produk yang menanggapi kebutuhan pelanggan.
4. Mengembangkan proses yang dapat menghasilkan keistimewaan produk.
5. Mentransfer rencana yang dihasilkan kedalam tenaga operasi.

³⁶ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, ..., h. 79-80.

b. Pengendalian Mutu

Terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kerja mutu nyata.
2. Membandingkan kinerja nyata dengan tujuan mutu.
3. Bertindak berdasarkan perbedaan.

c. Peningkatan Mutu

Penigkatan mutu adalah cara-cara kenaikan kerja mutu ketingkat yang tak pernah terjadi sebelumnya (terobosan). Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin meningkatkan mutu tahunan.
2. Mengenali kebutuhan khusus untuk peningkatan proyek peningkatan.
3. Untuk setiap produk bentuklah satu tim proyek dengan tanggungjawab yang jelas untuk membawa proyek meraih keberhasilan.
4. Memberikan sumber daya, motivasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tim untuk mendiagnosa sebabnya, merangsang penetapan cara penyembuhan dan menetapkan kendala untuk mempertahankan perolehan.³⁷

³⁷ J. M. Juran, *kepemimpinan Mutu, Pedoman peningkatan Mutu untuk Meraih keunggulan kompetitif*,(Jakarta: PT. Pustaka Binawan Presindo, 1995), h. 22-24

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Sekolah

Sekolah merupakan satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, dipandang sebagai organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi perlu dikelola, diatur, ditata dan diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan.³⁸

Komponen-komponen yang perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga menghasilkan mutu pendidikan sekolah yang baik, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum dan Program Pengajaran

Kurikulum berasal dari bahasa latin "*curriculum*", semula berarti "*a running course, specialy a carriot race*", istilah ini digunakan untuk sejumlah *course* atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan sekolah.³⁹

³⁸ Nanang Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Andira, 2002), h.1

³⁹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) cet. 5, h. 9

Sacara operasional kurikulum dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang dilaksanakan dari tahun ketahun.
2. Suatu usaha untuk menyampaikan asas dan ciri terpenting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan pendidikan di sekolah.
3. Tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat belajar dan cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.
4. Bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan pengajaran untuk para peserta didiknya.
5. Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴⁰

Kurikulum merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya, dimana kurikulum mempunyai unsur penting, yaitu;

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan tersebut.
2. Pengetahuan (*knowledge*), informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dari mana kurikulum tersebut dibentuk.

⁴⁰ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2-3

3. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh para pendidik untuk mengajar dan mendorong peserta didik belajar dan membawa mereka kearah yang dikehendaki kurikulum.
4. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum.⁴¹

Program pendidikan yang berkualitas terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus ada dalam program pendidikan tersebut: *pertama*, program pendidikan harus menarik, atraktif bagi siswa, orang tua, masyarakat lokal atau sponsor, pemodal potensial dan orang-orang yang menjalankan program itu sendiri seperti pengajar, administrator dan stafnya. Untuk menjadi atraktif maka program pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan dan ketertarikan populasi khusus saat itu atau calon siswa.

Kedua, program pendidikan harus bermanfaat karena program pengajaran bisa saja atraktif, tetapi tidak berkualitas tinggi bila mengabaikan pentingnya masalah. Kebutuhan, dan perhatian masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada

Ketiga, program pendidikan harus kongruen dalam arti terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dengan kenyataannya. Pengalaman belajar akan berkualitas apabila materi yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan lembaga pendidikan itu sebelumnya dan nilai-nilai

⁴¹ Nur Uhbiyati *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. 2, h. 75-76

yang diekspresikan sesuai dengan gaya belajar individual dan keputusan institusional.

Keempat, program pendidikan harus memiliki ciri khusus atau berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Namun demikian program pendidikan yang berkualitas tidak harus berbeda sama sekali dengan lembaga lain. Perbedaan itu dapat direfleksikan pada tujuan khusus, sifat, dan orang-orang dalam lembaga. Untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas harus memperhatikan sejarah khas lembaga tersebut seperti misi, tujuan, gaya, sumber daya, proyeksi masa depan, dan adanya bimbingan dalam mendesain program pendidikan.

Kelima, program pendidikan harus efektif. Pendidikan akan berkualitas bila hasil belajar yang dimaksud telah didefinisikan secara jelas dan pencapaian belajar didokumentasikan serta dikomunikasikan secara persuasif. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui hasil yang diharapkan sudah tercapai atau belum.

Keenam, program pendidikan harus fungsional dalam arti memiliki pengajar yang akan mempersiapkan dan membantu peserta didik untuk berkembang. Selain itu juga membantu peserta didik untuk mengembangkan intelektualitas, personal atau kepribadian, pekerjaan atau keterampilan khusus, etika dan sikap yang akan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat mendatang yang kompleks dan berubah-ubah.

Ketujuh, program pendidikan harus tumbuh dalam arti menyediakan berbagai cara untuk mengukur kebutuhan peserta didik. Juga membantu siswa untuk terus tumbuh dan berkembang tingkat kematangannya dengan cara yang memuaskan. Perkembangan yang diperhatikan adalah kognitif, afektif, etika, moral, sosial, fisik, dan dimensi-dimensi intrapersonal.⁴²

b. Tenaga Kependidikan

Telah banyak referensi yang memuat pendapat para ahli mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan, terutama tenaga akademik yang melakukan tugas mendidik dan mengajar, dan mereka harus memenuhi kriteria minimal. Jika ditelaah secara seksama beberapa referensi yang relevan, maka kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu: (1) fisik, (2) pribadi, (3) profesional, dan (4) sosial. Kualifikasi pertama berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan fisik, ciri-ciri khusus fisik dan daya dukung kemampuan verbal. Kualifikasi kedua berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian tenaga pengajar, seperti keimanan, kepribadian sebagai insan Pancasila, dan normal secara kejiwaan. Kualifikasi ketiga berkenaan dengan tugas-tugas teknis pengajaran dan penguasaan materi bahan ajar dengan segala perangkat pendukungnya yang terkait langsung, serta kemampuannya menciptakan kondisi anak didik menjadi masyarakat belajar (*learning*

⁴² Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, h. 78

society) yang kian dirasakan mendesak pada era globalisasi ekonomi dan informasi ini. Kualifikasi keempat berkaitan dengan fungsi tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari anggota masyarakat Indonesia yang Pancasila.⁴³

c. Kepemimpinan

Proses pendidikan di sekolah bukan hanya belajar mengajar saja, dengan berbagai komponen-komponen yang ada tidak serta merta menjadikan sekolah tersebut sebagai lembaga pendidikan yang dikelola secara baik, efisien dan efektif. Kepemimpinan manajerial sekolah sangat penting, kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan umumnya.

Kepala sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya meningkatkan tanggungjawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum, dan keputusan personal, tetapi juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya. Kepala sekolah harus pandai dalam memimpin kelompok dan pendelegasian tugas dan wewenang.⁴⁴

Kemampuan pimpinan sekolah untuk melakukan kajian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, akan sangat membantu dalam mengorganisasikan lembaga pendidikannya.

⁴³ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, ...*, h. 82

⁴⁴ Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, h. 119

Ada suatu pendapat bahwa pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi: *pertama*, pembelajar sepanjang hayat. *Kedua*, berketrampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari. *Keempat*, siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan. *Kelima*, menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial, politik dan budaya.⁴⁵

d. Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola

⁴⁵ Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, h 71

dengan sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.⁴⁶

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat- alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya.

Sarana dan prasarana harus diatur dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi: kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal

⁴⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, ..., h. 47-48

untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.⁴⁷

f. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) menunjukkan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat.

Melalui hubungan yang harmonis, diharapkan tercapai hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah dengan masyarakat secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari “penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup”.⁴⁸

⁴⁷ E. Mulyasa , *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, h.50

⁴⁸ E. Mulyasa , *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, h.52